

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gosita, Arief, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademi Presindo, 1993.
- Irianto, Sulistyowati, Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: INSISTPress, 2008
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1990
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987
- Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2008
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soemitro, Ronny Hanitiyo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Masriani, Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Penanganan, Pelindungan, Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Skripsi

Anneke Putri Willihardi, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia." Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2020.

<https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/929>

Dea Anjani, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Revenge Porn Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67472>

Maiswa Nur Inayah Ridwan, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)." Universitas Hasanuddin Makassar, 2022. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/17689>

Jurnal

- Alfira Destriannisya, "Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies*, 3 (2), 2024
- Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Jurnal Judiciary*, 14 (1), 2025
- Armadani Purnama Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)."*Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 8 (1), 2022
- Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum. "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn." *Jurnal USM Law Review*, 4, 2021
- Hwian Christianto, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural." *VeJ* 3 (2), 2017
- Komnas Perempuan, "Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi Cegah Komnas Perempuan 2024." 7 Maret, 2025.
- Komnas Perempuan, "Saran Dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Juli, 2023
- Rahma Melisha Fajrina, "Pencegahan Tindak Pidana Pornografi Online Melalui Penerapan Etika Digital Di Media Sosial", *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, Vol. 2 No. 5 (2025)
- Sintya Mauliddina, dkk, "Revenge Porn dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum," *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 7 (1), 2024
- Tyrone Kirchengast, "The Limits of Criminal Law and Justice: 'revenge porn' Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim." *UniSA Student Law Review*, 2, 2016.
- Yuliana Beatrich Yosephine Purba, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn Dalam Yurisdiksi Virtual Berdasarkan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Sains*, 3 (11), 2023

Internet

- Aliya Musyrifah Anas, "Revenge Porn & Sextortion: Polemik yang dialami Rebecca Klopper, Bagaimana Negara Melindungi?," *Advokat Konstitusi*, 4 Juni 2023. Diakses pada 1 Maret 2026 dari

<https://advokatkonstitusi.com/polemik-yang-dialami-rebecca-klopper-bagaimana-negara-melindungi/>

Biro Humas dan Umum KemenPPPA, “Kemen PPPA Dorong Percepatan Pembentukan UPTD PPPA di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh,” KemenPPPA, November 2025. Diakses pada 1 Maret 2026 dari <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-dorong-percepatan-pembentukan-uptd-pppa-di-11-kabupatenkota-di-provinsi-aceh>

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.” diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/34 Pada 29 November 1985, https://www.ohchr.org/en/instruments_mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse

Pusiknas Bareskrim Polri, (2024, 22 Agustus) “Perempuan, Paling Banyak Menjadi Korban Kejahatan Pornografi”. Diakses pada 9 Januari 2025, dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perempuan_paling_banyak_menjadi_korban_kejahatan_pornografi

Wawancara

Achmad Misrin. (2026, 3 Maret). Wawancara Analisis Hukum UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah